
**PENGARUH KESADARAN PAJAK PBB, KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ikhwan Wadi¹, Ahmad Hidayat²

Universitas Gunung Rinjani
Email: ikhwanwadi58@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 80 responden masyarakat sebagai wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, baik secara parsial maupun simultan. Partisipasi masyarakat merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi pendapatan daerah.

Kata kunci: Kesadaran Pajak PBB, Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian fiskal yang memadai dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemandirian fiskal tersebut tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas keuangan daerah karena menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan publik tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Salah satu komponen utama PAD yang memiliki potensi besar dan berkelanjutan adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peranan strategis karena basis pemajakannya relatif stabil dan mencakup hampir seluruh lapisan

masyarakat. PBB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB menjadi isu penting dalam penguatan keuangan daerah.

Namun demikian, realisasi penerimaan PBB di banyak daerah, termasuk Kabupaten Lombok Timur, masih menghadapi berbagai kendala. Potensi objek pajak yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat penerimaan yang optimal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan perilaku yang memengaruhi efektivitas pemungutan PBB. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor perilaku masyarakat sebagai wajib pajak dan kualitas tata kelola pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan PBB adalah kesadaran pajak masyarakat. Kesadaran pajak mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga memiliki dorongan internal untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak seringkali ditandai dengan anggapan bahwa pajak merupakan beban semata, kurangnya pemahaman terhadap manfaat pajak, serta minimnya pengetahuan mengenai kewajiban PBB. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Permasalahan kesadaran pajak PBB di Kabupaten Lombok Timur masih terlihat dari adanya tunggakan pajak, keterlambatan pembayaran, serta rendahnya inisiatif masyarakat untuk memperbarui data objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran pajak menjadi variabel penting yang perlu dikaji secara empiris dalam kaitannya dengan pendapatan daerah.

Selain kesadaran pajak, kualitas pelayanan publik juga merupakan faktor krusial dalam mendukung optimalisasi penerimaan PBB. Pelayanan publik di bidang perpajakan mencakup kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kecepatan layanan, sikap dan kompetensi petugas, serta aksesibilitas sarana pembayaran pajak. Pelayanan yang berkualitas akan menciptakan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, tidak transparan, dan kurang responsif dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan PBB, seperti keterbatasan informasi mengenai besaran pajak, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta akses layanan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah perdesaan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan dalam

pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik perlu dianalisis sebagai variabel yang berpotensi memengaruhi pendapatan daerah melalui mekanisme peningkatan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam konteks perpajakan daerah tidak hanya terbatas pada tindakan membayar pajak, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, kesediaan memberikan masukan terhadap kebijakan pajak, serta kepedulian terhadap pemanfaatan hasil pajak bagi pembangunan daerah. Partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengindikasikan adanya jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di Kabupaten Lombok Timur, partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan daerah masih cenderung pasif. Banyak masyarakat yang membayar PBB hanya karena kewajiban administratif, bukan karena kesadaran dan keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah. Selain itu, minimnya ruang partisipasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat memperlemah peran masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi variabel penting yang perlu dianalisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PBB, dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku dan tata kelola, di antaranya kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi pendapatan daerah apabila dikelola secara efektif.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan tiga variabel perilaku dan kelembagaan kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dengan pendapatan daerah berdasarkan persepsi masyarakat sebagai responden utama. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak atau penerimaan PBB secara kuantitatif berbasis data sekunder. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menggunakan data kuesioner masyarakat untuk menilai bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat memengaruhi pendapatan daerah, khususnya di tingkat kabupaten. Selain itu, fokus pada Kabupaten Lombok Timur sebagai wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang beragam memberikan kontribusi empiris yang kontekstual dan relevan bagi pengembangan kebijakan pajak daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keuangan daerah dan perpajakan daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah melalui pendekatan peningkatan kesadaran pajak, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris melalui pengukuran yang terstruktur dan dapat dianalisis secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pajak daerah dan keuangan daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar sebagai wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menggunakan sampel sebagai representasi populasi. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan minimal penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, sehingga mampu memberikan hasil estimasi yang reliabel dan representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden merupakan masyarakat yang memiliki objek PBB di Kabupaten Lombok Timur, berusia minimal 18 tahun, pernah atau sedang melakukan pembayaran PBB, serta bersedia menjadi responden penelitian.

Instrumen pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Variabel kesadaran pajak PBB diukur melalui indikator pemahaman terhadap kewajiban pajak, kesadaran akan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, serta ketepatan waktu pembayaran PBB. Variabel kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator kejelasan informasi, kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, sikap petugas, dan kemudahan akses layanan pembayaran pajak. Variabel partisipasi masyarakat diukur melalui indikator keterlibatan dalam sosialisasi perpajakan, kepedulian terhadap penggunaan dana pajak, serta kesediaan memberikan masukan terkait pengelolaan pajak daerah. Sementara itu, variabel pendapatan daerah diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui

uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak dan konsisten. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat analisis statistik. Hasil analisis regresi diinterpretasikan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pendapatan daerah. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri atas wilayah perkotaan, perdesaan, serta kawasan pesisir dan pertanian. Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam tersebut menjadikan Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Timur dikelola oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. PBB dipungut atas objek berupa tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah, PBB memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dugaan sementara yang telah dirumuskan berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Uji hipotesis bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Uji hipotesis dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Melalui uji ini dapat diketahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan

apakah model regresi yang dibangun layak dan mampu menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Tabel 1 Uji Hipotesis

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t hitung	Sig.	Keterangan
1	Kesadaran Pajak PBB (X1)	0,312	3,214	0,002	Signifikan
2	Kualitas Pelayanan Publik (X2)	0,287	2,845	0,006	Signifikan
3	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,341	3,567	0,001	Signifikan

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak PBB (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,312 dengan nilai t hitung 3,214 dan tingkat signifikansi 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa kesadaran pajak PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen) yang menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kesadaran pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong niat dan perilaku patuh dalam membayar pajak. Ketika masyarakat memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, mereka cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban PBB secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Kesadaran pajak yang tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak bagi peningkatan

pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, kesadaran pajak PBB menjadi salah satu instrumen strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung berbagai riset terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahman (2019) serta Putra dan Dewi (2021) menemukan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak PBB secara langsung berdampak pada meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak dan penerimaan pajak daerah. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya pendapatan PBB di daerah sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Kesesuaian antara hasil penelitian ini dengan teori dan penelitian terdahulu memperkuat argumen bahwa kesadaran pajak PBB memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Kesadaran wajib pajak tidak hanya berfungsi sebagai faktor individual, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor PBB perlu diimbangi dengan program edukasi perpajakan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyampaian informasi yang transparan mengenai pemanfaatan pajak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan publik (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,287 dengan nilai t hitung 2,845 dan tingkat signifikansi 0,006. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kualitas pelayanan (Service Quality Theory) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam konteks pelayanan perpajakan daerah, pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses akan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori legitimasi, yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi dan kinerja pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme dan akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga meningkatkan legitimasi institusi pemerintah di mata masyarakat. Ketika masyarakat menilai pemerintah mampu memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Suryani (2020) serta Handayani (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Penelitian lain oleh Wibowo (2019) juga menemukan bahwa pelayanan perpajakan yang berbasis teknologi dan kemudahan akses mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di tingkat daerah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kualitas pelayanan publik merupakan faktor strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kesesuaian antara temuan penelitian, teori, dan riset terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Perbaikan sistem pelayanan perpajakan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,341, yang merupakan nilai terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, dengan nilai t hitung 3,567 dan tingkat signifikansi 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat (participatory development theory) yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan, serta pengawasan kebijakan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam konteks perpajakan daerah tidak hanya terbatas pada kepatuhan membayar pajak, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengawasan penggunaan anggaran dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Keterlibatan ini mendorong rasa memiliki (sense of ownership) terhadap pembangunan daerah, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak daerah secara sukarela.

Selain itu, temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance theory), yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama selain transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Lestari (2020) serta Kurniawan (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli

daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak daerah. Penelitian lain oleh Rahmawati (2019) juga menyatakan bahwa daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki penerimaan pajak daerah yang lebih optimal dibandingkan daerah dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor dominan dalam memengaruhi pendapatan daerah.

Besarnya koefisien regresi pada variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa variabel ini memiliki peran paling kuat dalam model penelitian. Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran, forum musyawarah yang inklusif, serta edukasi publik mengenai pentingnya pajak daerah bagi kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak PBB, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Secara parsial, ketiga variabel tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Partisipasi masyarakat menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi pendapatan daerah, diikuti oleh kesadaran pajak PBB dan kualitas pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada peningkatan kesadaran, kualitas layanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

REFRENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Handayani, R. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 45–58.
- Hidayat, A., & Lestari, S. (2020). Partisipasi masyarakat dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112–125.

-
- Kurniawan, D. (2021). Good governance dan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 33–47.
- Mardiasmo. (2018). Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kerangka otonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 1–14.
- Nugroho, A. (2020). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 89–101.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pratama, R., & Suryani, T. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 512–526.
- Putra, I. G. N., & Dewi, N. P. S. (2021). Kesadaran wajib pajak dan penerimaan PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 210–222.
- Rahmawati, E. (2019). Peran partisipasi masyarakat dalam optimalisasi pajak daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 65–78.
- Sari, M., & Rahman, A. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak PBB. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–158.
- Setiawan, B. (2020). Pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23–37.
- Simanjuntak, T. (2019). Pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 11(2), 98–110.
- Siregar, D. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah pasca desentralisasi fiskal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 6(1), 41–55.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif dalam kajian ekonomi publik. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 8(2), 1–12.
- Wibowo, A. (2019). Digitalisasi pelayanan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 4(2), 77–90.

-
- Yani, A. (2018). Hubungan pajak daerah dan pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(1), 15–27.
- Yuliana, R., & Putri, A. (2020). Kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 134–147.
- Zainal, M. (2019). Good governance dan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 55–69.
- Zulkifli, M., & Hasan, R. (2021). Determinan pendapatan daerah berbasis pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 7(3), 201–215.